

**PERLINDUNGAN HUKUM PIDANA TERHADAP PEKERJA RUMAH
TANGGA YANG MENJADI KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN**
(Studi Putusan Hakim Nomor: 132/Pid.Sus//2010/PN.Ska dan
Nomor: 844K/Pid.Sus/2015)



Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata 1
pada Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum

Oleh:

THIFALI QURRATUAIN ZALFA TANI
C100140127

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2018

HALAMAN PERSETUJUAN

**PERLINDUNGAN HUKUM PIDANA TERHADAP PEKERJA RUMAH
TANGGA YANG MENJADI KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN
(Studi Putusan Hakim Nomor: 132/Pid.Sus//2010/PN.Ska dan Nomor: 844
K/Pid.Sus/2015)**

PUBLIKASI ILMIAH

Oleh:

THIFALI QURRATUAIN ZALFA TANI
C100140127

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh:

Dosen Pembimbing



(Kuswardani, S.H., M.Hum.)

HALAMAN PENGESAHAN

PERLINDUNGAN HUKUM PIDANA TERHADAP PEKERJA RUMAH TANGGA YANG MENJADI KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN

(Studi Putusan Hakim Nomor: 132/Pid.Sus//2010/PN.Ska,
Nomor: 844 K/Pid.Sus/2015, dan Nomor: 1643 K/Pid/2013)

Oleh:

THIFALI QURRATUAIN ZALFA TANI
C100140127

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Fakultas Hukum

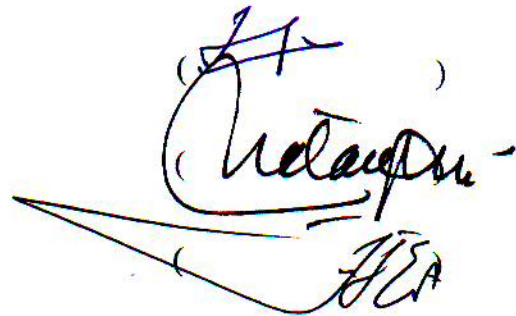
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pada hari Senin, 30 Juli 2018

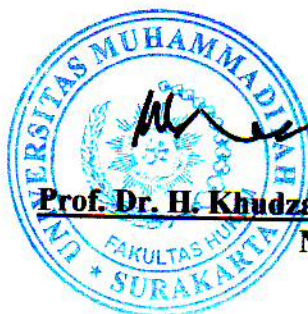
dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Dewan Penguji:

1. Kuswardani, S.H., M.Hum.
(Ketua Dewan Penguji)
2. Dr. Natangsa Surbakti, S.H., M.Hum.
(Anggota I Dewan Penguji)
3. Muchamad Iksan, S.H., M.H.
(Anggota II Dewan Penguji)



Dekan,



Prof. Dr. H. Khudzaifah Dimiyati, S.H., M.Hum
NIK. 537

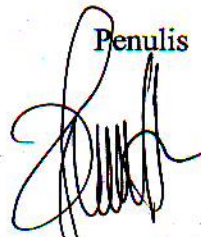
PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam naskah publikasi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya di atas, maka akan saya pertanggungjawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 27 Juli 2018

Penulis



Thifali Qurratuain Zalfa Tani
C100140127

**PERLINDUNGAN HUKUM PIDANA TERHADAP PEKERJA RUMAH
TANGGA YANG MENJADI KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN
(Studi Putusan Hakim Nomor: 132/Pid.Sus//2010/PN.Ska dan Nomor:
844K/Pid.Sus/2015)**

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum pidana yang diberikan terhadap pekerja rumah tangga (PRT) yang menjadi korban tindak pidana kekerasan dan perlindungan PRT dilihat dalam putusan hakim. Metode penelitian melalui metode pendekatan normatif yang bersifat deskriptif. Jenis data termasuk data sekunder yakni sumber hukum primer dan sumber hukum sekunder, sedangkan sumber data berasal dari studi kepustakaan, kemudian data dianalisis menggunakan analisis data kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum pidana yang diberikan kepada PRT dibagi menjadi dua yaitu hukum pidana formil dan hukum pidana materiil, yakni untuk mencegah agar tidak menjadi korban tindak pidana yang belum menjadi korban dan perlindungan hukum bagi yang telah menjadi korban kekerasan yaitu memperoleh restitusi dan kompensasi, konseling, pelayanan hukum dan bantuan hukum. Putusan hakim yang dijatuhkan terhadap terdakwa sesuai dengan fakta-fakta hukum yang ada pada dasarnya telah terbukti dan berdasarkan peraturan-peraturan hukum pidana yang ada telah diputuskannya dakwaan dari ketiga terdakwa. Perlindungan hukum dalam perkara ini sudah sesuai dengan perlindungan hukum pidana kepada PRT yang menjadi korban tindak pidana kekerasan dengan dilihatnya dari masing-masing unsur dalam undang-undang yang menjadi dasar pertimbangan hakim.

Kata Kunci: perlindungan hukum, PRT, tindak pidana kekerasan

Abstract

This study aims to determine the protection of criminal law provided against domestic workers who become victims of violence and protection of domestic workers seen in the judge's decision. The method of research through normative approach method that is descriptive. The type of data includes secondary data ie primary law source and secondary law source, while data source comes from literature study, then data is analyzed using qualitative data analysis. The results show that the protection of criminal law provided to domestic workers is divided into two, namely formal criminal law and material criminal law, namely to prevent from becoming victims of non-victimized crime and legal protection for those who have become victims of violence that is obtaining restitution and compensation, counseling, legal services and legal aid. The judge's verdict against the defendant in accordance with the existing legal facts has been proven and based on the existing criminal law rules he has decided the indictment of the three defendants. Legal protection in this case is in accordance with the protection of criminal law to domestic workers who become victims of violent crime with the view of each element in the law on which judge consideration.

Keywords: legal protection, domestic workers, violent crime

1. PENDAHULUAN

Pekerja Rumah Tangga atau yang biasa dikenal dengan PRT adalah orang yang bekerja pada seseorang dalam rumah tangga untuk melakukan pekerjaan kerumahtanggaan seperti mencuci piring, membersihkan rumah, mencuci baju dan pekerjaan rumah tangga lainnya yang diberikan oleh majikan. Keberadaan PRT sudah tidak asing keberadaannya di Indonesia baik di kota maupun di desa.

PRT yang telah melakukan tugasnya akan diberikan imbalan, imbalan yang diberikan sebesar yang telah disepakati oleh PRT dan majikan. Ada PRT yang selesai melaksanakan tugasnya langsung diberikan imbalan, dan adapula PRT yang menginap di tempat majikan dan akan diberikan imbalan pada tanggal yang telah disepakati. PRT yang menginap di tempat majikan akan diberikan fasilitas kamar, makan, sabun, sesuai dengan kesepakatan antara PRT dan majikan.

Keberadaan PRT tidak diakui sebagai tenaga kerja yang sama dengan tenaga kerja lainnya seperti pekerja pabrik, perusahaan, dan lain-lain. Oleh karena itu PRT dimasukkan ke dalam ruang lingkup informal. Sektor informal yang diisi oleh jenis kerja domestik seperti PRT rentan terhadap berbagai tindak kekerasan dan tentunya membutuhkan perlindungan ekstra dari negara.¹

Dalam Pasal 27 ayat (2) menyatakan "*Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan*". Selain itu juga pada Pasal 28G ayat (1) dan (2) UUD 1945 menyatakan "*Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi manusia*" dan "*setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain*".

Namun dalam kenyataannya di Indonesia banyak sekali PRT yang menjadi korban tindak pidana kekerasan. Kekerasan merupakan masalah yang serius yang harus ditanggapi oleh Pemerintah. Kekerasan dalam. PRT masuk ke dalam ruang lingkup rumah tangga. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor

¹Ana Sabhana Azmy, 2012, *Negara dan Buruh Migran Perempuan: Menelaah Kebijakan Perlindungan Masa Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono 2004-2010*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, hal. 5.

23 Tahun 2004 yang berisi “Lingkup Rumah Tangga dalam Undang-Undang” meliputi: (a) *Suami, istri, anak*; (b) *Orang-orang yang mempunyai hubungan kerja dengan orang sebagaimana dimaksud dalam huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian yang menetap dalam rumah tangga dan atau*; (c) *Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut*.

Kekerasan harus dipahami dalam pengertian yang luas, karena pada dasarnya masyarakat memahami kekerasan hanya berupa fisik saja yaitu pemukulan terhadap seseorang. Kekerasan ada juga yang non fisik yaitu tidak mendapatkan upah yang sesuai dengan perjanjian atau tidak mendapatkan upah setelah beberapa bulan ia bekerja. Menyangkut pada fakta yang terjadi di Indonesia perlindungan hak korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga khususnya Pekerja Rumah Tangga belum terealisasi sebagaimana seharusnya.

Di Indonesia kekerasan terhadap PRT sering kali terjadi, dalam kurung waktu September 2016 kekerasan terhadap PRT mencapai 217 kasus. Kekerasan terhadap PRT meliputi melingkupi kekerasan multijenris, kekerasan fisik dan kekerasan ekonomi. Angka kekerasan multijenris mencapai 41 kasus. Kekerasan multijenris merupakan merupakan kekerasan psikis, fisik, ekonomi, hingga seksual yang diberikan terhadap PRT. Kekerasan fisik mencapai 102 kasus yang meliputi pemukulan, isolasi dan perdagangan manusia terhadap PRT. Sementara itu kekerasan ekonomi karena upah tidak dibayar mencapai 74 kasus.²

Berdasarkan latar belakang di atas, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perlindungan hukum pidana apa yang diberikan terhadap pekerja rumah tangga yang menjadi korban tindak pidana kekerasan dan untuk mengetahui perlindungan pekerja rumah tangga dilihat dalam putusan hakim. Adapun manfaat dan kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) Manfaat teoritis, untuk lebih mendalami ilmu pengetahuan baik di bidang hukum pada umumnya maupun di bidang hukum pidana, serta dapat mengetahui keserasian antara ilmu hukum yang didapat selama perkuliahan dengan praktik yang ada di lapangan; (2) Manfaat praktis, diharapkan penelitian ini dapat

²Kompas.com, Kamis, 15 September 2016, *Hingga September 2016, Kekerasan Terhadap PRT Capai 217 Kasus*, dalam <http://nasional.kompas.com/read/2016/09/15/16403781/hingga.september.2016.kekerasan.terhadap.prt.capai.217.kasus>, diunduh 5 Desember 2017, pukul 20.33 WIB.

memberikan informasi dan pengetahuan yang jelas kepada para pembaca tentang perlindungan hukum pidana terhadap pekerja rumah tangga yang menjadi korban tindak pidana kekerasan (Studi Putusan Hakim Nomor: 132/Pid.Sus//2010/PN.Ska, Nomor: 844K/Pid.Sus/2015, dan Nomor: 1643 K/Pid/2013) serta dapat mengembangkan pola pikir yang sistematis dan dinamis sehingga dapat mengidentifikasi dan mengetahui permasalahan yang dihadapi, serta memberikan masukan dan pertimbangan bagi seluruh pihak-pihak terkait.

2. METODE

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif yang bertujuan untuk memberikan gambaran tentang suatu keadaan secara objektif mengenai jenis dan sumber data. Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan penelitian ini yaitu pendekatan normatif yaitu penelitian hukum dokumenter dikarenakan penelitian ini lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang ada di perpustakaan, seperti buku-buku, dan dokumen-dokumen resmi dari pemerintahan.³ Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, mencakup bentuk buku-buku atau dokumentasi yang biasanya disediakan di perpustakaan ataupun milik pribadi, maupun sumber lainnya yang diperlukan sesuai dengan judul dalam penelitian ini terdiri dari (a) bahan hukum primer, dan bahan hukum sekunder, yakni bahan hukum yang menjelaskan bahan yang berupa buku, literatur-literatur, buku ataupun jurnal hukum. Sumber data merupakan hasil penelitian yang bersumber dari kepustakaan meliputi data yang ada peraturan perundang-undangan yang terkait dan bahan buku-buku hukum dan pendapat-pendapat para sarjana. Metode analisis data yang digunakan dalam penulisan ini menekankan pada langkah-langkah spekulatif teoritis dan analisis normatif kualitatif yaitu pertama-tama yang dilakukan adalah melakukan pengumpulan data dalam studi kepustakaan, kemudian data yang diperoleh disusun dalam bentuk penyusunan data dan kemudian dilakukan pengolahan data sampai akhirnya dapat ditarik kesimpulan untuk mendapatkan validitas data yang ada.

³H. Ishaq, 2017, *Metodologi Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, Bandung: Penerbit Alfabet, hal. 27.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Pengaturan Hukum Pidana terhadap Perlindungan Hukum Pekerja Rumah Tangga yang Menjadi Korban Tindak Pidana Kekerasan

Istilah tindak pidana kekerasan ini dalam masyarakat dikenal dengan istilah kekerasan yang ditunjukkan kepada perempuan, sehingga istilahnya adalah cukup dengan *kekerasan terhadap perempuan*, tanpa adanya istilah tindak pidana. Istilah kekerasan terhadap perempuan ini sudah dikenal diseluruh belahan dunia dan merupakan normative, sebagaimana dalam Resolusi PBB No. 48/104, 20 Desember 1993 tentang *Declaration on the Elimination of Violence against Women*. Deklarasi ini menyebut tindak pidana atau kejahatan terhadap perempuan sebagai kekerasan terhadap perempuan. Deklarasi ini mengakui pula tentang kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga, yang dapat diketahui dari substansi perbuatan tersebut dan menanggulangi nya melalui kebijakan negara.⁴

Oleh karena itu perlindungan hukum terhadap setiap orang telah dijamin secara konstitusional dalam Pasal 28 D sampai dengan Pasal 28 G Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Adapun perlindungan hukum itu meliputi: (1) Mendapatkan perlindungan dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum; (2) Mendapatkan hak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan Hak Asasi Manusia; (3) Mendapatkan perlindungan untuk tidak disiksa; (4) Mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif; dan (5) Mendapatkan perlindungan untuk saling menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Dari penjabaran substansi di atas pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ini untuk perilaku yang melanggar hak-hak seseorang dan menimbulkan penderitaan diatur dalam hukum pidana baik hukum pidana formil maupun hukum pidana materiil.

⁴Lihat Kuswardani, "*Bentuk-bentuk Kekerasan Domestik dan Permasalahannya (Studi Perbandingan Hukum Indonesia dan Malaysia)*", *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Volume 47, No. 4, 2017, halaman 421-438

Pertama, hukum pidana formil. Pada hukum pidana formil itu memberikan perlindungan hukum kepada seseorang yang telah menjadi korban. Perlindungan hukum pidana terhadap PRT yang telah menjadi korban tindak pidana, perlindungan ini untuk memperoleh jaminan atau santunan hukum atas penderitaan atau kerugian orang yang telah menjadi korban kejahatan, termasuk hak korban untuk memperoleh pemenuhan hak. Hal ini berarti perlindungan korban secara langsung. Perlindungan yang Diberikan kepada Orang yang telah Menjadi Korban Tindak Pidana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, khususnya pada Pasal 5 ayat (1), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Adapun bentuk perlindungannya yakni memperoleh jaminan/santunan hukum atas kerugian orang yang telah menjadi korban, antara lain: (1) Restitusi dan kompensasi, (2) Konseling, (3) Pelayanan hukum, dan (4) Bantuan hukum. Sedangkan pihak yang memberikan perlindungan untuk memperoleh jaminan hukum atas kerugian yang telah menjadi korban kekerasan antara lain: (1) Kepolisian, untuk melaporkan dan memproses pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga; (2) Advokat, untuk membantu korban dalam proses peradilan; dan (3) Penegak hukum lainnya, untuk membantu korban dalam proses di sidang pengadilan. Selanjutnya, dalam hal ini praktek pelaksanaan yang dilakukan kepada korban kekerasan untuk memberikan penanganan dan pemulihan korban secara komprehensif, melindungi korban, serta menindak pelaku kekerasan.

Kedua, hukum pidana materiil. Perlindungan yang diberikan dalam hukum pidana materiil itu berupa perlindungan agar tidak ada yang menjadi korban kekerasan, atau dapat berupa hak-hak asasi manusia atau kepentingan hukum seseorang yang tidak dapat dilanggar oleh orang lain. Adapun perlindungan hukum pidana terhadap PRT agar tidak menjadi korban kekerasan perlindungan hukum ini identik dengan perlindungan hak asasi manusia atau kepentingan hukum seseorang yang berarti perlindungan korban tidak secara langsung diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yakni: (1) Mendapatkan perlindungan dan kepastian hukum yang adil, serta

perlakuan yang sama di hadapan hukum; (2) Mendapatkan hak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan Hak Asasi Manusia; (3) Mendapatkan perlindungan untuk tidak disiksa; (3) Mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif; dan (4) Mendapatkan perlindungan untuk saling menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Selanjutnya, juga diatur dalam Peraturan Menteri Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga dengan menjelaskan hak-hak PRT, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, PRT masuk ke dalam ruang lingkup rumah tangga. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004.

Dalam hal ini adapun bentuk perlindungan yang diberikan kepada korban, sebagai berikut: (1) Untuk tidak disiksa; (2) Mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif; (3) Memperoleh informasi; 4) Mendapatkan perlakuan yang baik; (5) Mendapatkan upah sesuai dengan perjanjian kerja; (6) Mendapatkan makanan dan minuman sehat; (7) Mendapatkan waktu istirahat yang cukup; (8) Mendapatkan hak cuti; dan (9) Mendapatkan kesempatan melakukan ibadah sesuai dengan agama yang dianut. Mengenai sanksi pidana antara lain dalam kasus: (1) Pemerkosaan dan serangan seksual, diatur pada Pasal 285 sampai dengan Pasal 291 KUHP. Jika mengakibatkan luka-luka berat, dijatuhkan pidana penjara paling lama dua belas tahun, dan jika mengakibatkan kematian dijatuhkan pidana penjara paling lama lima belas tahun; (2) Kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memaksa seseorang untuk melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginannya, diatur pada Pasal 335 KUHP dengan sanksi pidana penjara paling lama satu tahun atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah; (3) Pembunuhan, diatur dalam Pasal 338 sampai dengan Pasal 350 KUHP, jika karena pembunuhan dengan sanksi pidana paling lama lima belas tahun, jika pembunuhan dengan rencana dan pembunuhan yang didahului dengan perbuatan pidana diancam dengan penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun; dan (4) Penganiayaan, diatur pada Pasal 351 sampai dengan Pasal 358 KUHP yakni diancam dengan pidana penjara paling

lama dua belas tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah, jika mengakibatkan luka berat diancam pidana penjara paling lama lima tahun, jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun. Selanjutnya, dalam hal ini pada praktek pelaksanaan berupa dalam rangka memberikan perlindungan dilakukan dengan cara melindungi hak-hak setiap warga negara serta mencegah segala bentuk kekerasan.

PRT tidak dapat dipandang sebelah mata karena status mereka. Hal ini PRT yang bekerja mempunyai hak-hak yang harus dihargai dan dilindungi. PRT sama halnya dengan pekerja lainnya yang harus diberikan perlindungan hukum atas dirinya, agar terelalisasikan hak-hak PRT sebagaimana mestinya. Namun dalam kenyataannya di Indonesia banyak sekali PRT yang menjadi korban tindak pidana kekerasan. Kekerasan merupakan masalah yang serius yang harus ditanggapi oleh Pemerintah.

3.2. Perlindungan yang Diberikan kepada Pekerja Rumah Tangga yang Terkena Kasus Dilihat dalam Putusan Hakim yang akan Dijadikan Pijakan dalam Analisis

Filsafat hukum yang bernama Gustav Radbruch mengajarkan adanya tiga ide dasar hukum, yang oleh sebagian besar pakar teori hukum dan filsafat hukum, juga diidentikan sebagai tiga tujuan hukum, antaranya keadilan, kemafaatan dan kepastian hukum.⁵ Berkaitan dengan ini penulis akan membahas 3 (tiga) unsur yang diperhatikan sebagai dasar hukum, yaitu:

Pertama, keadilan adalah moral bangsa Indonesia. Setiap manusia berhak diperlakukan adil dan berperilaku adil dengan menyeimbangkan antara hak dan kewajiban. Hakikat keadilan adalah penilaian terhadap suatu perlakuan atau tindakan dengan mengkajinya dengan suatu norma yang menurut pandangan subjektif melalui norma-norma lain.

Berdasarkan hakikat keadilan di atas, majikan atau terdakwa tidak dapat memberikan keadilan kepada korban, karena dalam ketiga perkara tersebut korban tidak mendapatkan haknya sebagaimana yang tercantum dalam Rancangan

⁵Achmad Ali, 2010, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) & Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Undang-Undang (Legisprudence) Volume I Pemahaman Awal*, Jakarta:Kencana Prenada Media Group, hal. 288.

Undang-Undang Republik Indonesia tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga pada Pasal 3 ayat (1) perlindungan PRT.

Kedua, Kemanfaatan.Masyarakat mengharapkan kemanfaatan dalam pelaksanaan dan penegakan hukum. Hukum yang baik adalah hukum yang dapat memberikan manfaat kepada subyek hukum. Pelaksanaan dan penegakan hukum harus dapat menghindarkan timbulnya kerusuhan dalam masyarakat.

Ketiga, Kepastian Hukum. Kepastian hukum mengandung 2 (dua) pengertian, diantaranya: (1) Adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan; (2) Berupa keamanan hukum bagi individu dari kewenangan pemerintah karena adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu, kepastian hukum bukan hanya berupa pasal-pasal dalam undang-undang, melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan hakim antara putusan satu dengan putusan yang lain untuk kasus serupa yang telah diputus.⁶

Hal tersebut di atas adalah yang menjadi patokan bagi hakim untuk memberikan putusan kepada terdakwa, dalam hal ini dalam ketiga perkara hakim memutus sebagai berikut:

Paparan pada sub bab terdahulu mengenai perlindungan yang diberikan kepada pekerja rumah tangga yang terkena kasus dilihat dalam putusan hakim pada perkara Nomor: 132/Pid.Sus/2010/PN.Skadan Nomor: 844K/Pid.Sus/2015, menyatakan bahwa para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan kekerasan fisik” dalam lingkup rumah tangga.

Paparan pada perkara di atas hasil putusan hakim dalam menjatuhkan putusan pada perkara Nomor: 132/Pid.Sus//2010/PN.Skadan Nomor: 844K/Pid.Sus/ 2015, dalam dakwaan bermaksud dengan sengaja melakukan tindak pidana kekerasan dalam ruang lingkup keluarga sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 yang unsur-unsur

⁶Peter Mahmud Marzuki, 2008.*Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hal. 137.

pasalnya sebagai berikut: “(1) *Setiap orang*; (2) *Yang melakukan perbuatan kekerasan fisik*; (3) *Dalam lingkup rumah tangga*.”

Berdasarkan unsur-unsur di atas, dalam ketiga perkara ini dapat diketahui yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara ini yaitu dijelaskan bahwa unsur “*Setiap orang*” bahwa siapa saja yang melakukan kekerasan terhadap orang lain maka termasuk kedalam tindak kejahatan kekerasan. Unsur lain yang menjadi pertimbangan hakim adalah “*Dengan sengaja melakukan perbuatan kekerasan*” yang dapat menimbulkan luka fisik, kematian dan kesehatan psikologi yang diderita oleh masing-masing korban. Unsur yang ketiga “*Dalam lingkup rumah tangga*” bahwa setiap orang yang tinggal dan menetap dalam satu rumah itu berarti merupakan dalam lingkup rumah tangga.

Dakwaan yang diberikan kepada terdakwa dari ketiga perkara tersebut telah dibuktikan dengan alat bukti diantaranya keterangan saksi, keterangan terdakwa yang dihadirkan dalam persidangan. Dalam perkara Nomor: 844 K/Pid.Sus/2015 juga adanya petunjuk yang ditemukan dalam menemukan mayat korban. Berdasarkan hasil keterangan saksi, keterangan terdakwa dan petunjuk masing-masing terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, yaitu pada pekerja Nomor: 132/Pid.Sus/2010/PN.Ska kurungan penjara 6 (enam) bulan, perkara Nomor: 844K/Pid.Sus/2015 kurungan penjara 5 (lima) tahun,

Dengan pemaparan di atas maka Majelis Hakim telah memberikan perlindungan terhadap korban dalam putusannya dalam masing-masing perkara adalah sebagai berikut:

Pertama, perkara Nomor: 132/Pid.Sus/2010/PN.Ska. Dakwaan yang diberikan kepada terdakwa dalam perkara ini telah terbukti dengan bukti 1 (satu) buah gayung atau ciduk terbuat dari plastik warna merah 1 (satu) buah gunting *stainless steel* yang dipakai oleh terdakwa untuk memukul saksi korban Sri Wahyuni sebanyak 2 (dua) kali kena bagian mata kiri dan menggunting rambut saksi korban sehingga rambut Korban tidak beraturan. Berdasarkan hasil keterangan dari alat bukti tersebut akhirnya oleh penuntut menyatakan bahwa sesuai dengan Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga terdakwa dinyatakan terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, kepada terdakwa untuk

dijatuhkan hukuman pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Putusan yang dijatuhkan dalam perkara Nomor: 132/Pid.Sus/ 2010/PN.Ska dengan ancaman 6 (enam) bulan kepada terdakwa, karena terdakwa telah terbukti melakukan kekerasan fisik yang didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, yaitu Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004. Atas perbuatan terdakwa Pasal 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga atas perbuatan terdakwa korban mengalami luka memar dan lecet di mata sebelah kiri serta luka lecet di pelipis kiri hingga pipi kiri, sehingga dapat disimpulkan bahwa rasa sakit yang dialami oleh korban. Dengan demikian unsur “*yang melakukan perbuatan kekerasan fisik*” terpenuhi. Kemudian berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, orang yang bekerja sebagaimana dimaksud dalam huruf c dipandang sebagai anggota keluarga dalam jangka waktu selama berada di rumah.

Kedua, perkara Nomor: 844 K/Pid.Sus/2015.Dakwaan yang diberikan kepada terdakwa dalam perkara ini telah terbukti dengan bukti ditemukannya mayat korban dari hasil pemeriksaan fisik sesuai *visum et repertum* serta bukti berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Innova, warna Putih, Nomor Polisi BK 247 AI, dan 1 (satu) buah Baju Kaos, berwarna Merah. Oleh karena perbuatan si terdakwa dijatuhkan pidana penjara selama 5 (lima) tahun di LPKA Medan dan membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah).

Menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan “*dengan sengaja melakukan, menyuruh, melakukan dan turut serta melakukan perbuatan merampas nyawa orang lain*” yaitu korban. Penyebab kematian korban adalah pendarahan yang luas setentang patah tulang iga dada kiri dan kanan akibat trauma tumpul. Atas perbuatannya melanggar Pasal 338 jo. Pasal 55 ayat Pasal 5 ayat (2) ke-1 UU RI No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak dan Pasal 351 ayat (1) KUHP jo. Pasal 5 ayat (2) ke-1 UU RI No. 11 Tahun 2012 tentang

Sistem Peradilan., Pasal 44 ayat (3) Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang KDRT jo. Pasal 55 ayat (1) jo. Pasal 5 ayat (2) ke-1 Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak. 354 ayat (2) KUHPidana jo. Pasal 55 ayat (1) jo. Pasal 5 ayat (2) ke-1 Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHPidana jo. Pasal 55 ayat (1) jo. Pasal 5 ayat (2) ke-1 Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak

4. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Pertama, perlindungan hukum yang diberikan kepada pekerja rumah tangga dapat dibagi menjadi dua bagian yaitu: (1) Hukum pidana materil yaitu perlindungan hukum agar tidak menjadi korban tindak pidana, yang diatur dalam Peraturan Menteri Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PRT) yang menjelaskan tentang hak-hak PRT, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pasal 2 yang menjelaskan bahwa PRT juga termasuk dalam Lingkup Rumah Tangga yang juga mendapatkan perlindungan hukum. Substansi Undang-Undang ini merumuskan perbuatan-perbuatan terhadap orang dalam lingkup rumah tangga termasuk Pekerja Rumah Tangga yaitu dalam pasal 5 sampai dengan pasal 9 adapun perbuatan tersebut adalah kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, atau penelantaran rumah (2) Hukum pidana formil yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang terdapat pada Pasal 5 ayat (1), dan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dengan memberikan perhatian terhadap hak-hak korban yang tertindas. Dalam penulisan ini perlindungan ini diberikan untuk kepada pekerja rumah tangga untuk mencegah agar tidak menjadi korban tindak pidana yaitu perlindungan untuk memperoleh jaminan orang yang telah menjadi korban kekerasan yaitu memperoleh restitusi dan kompensasi, memperoleh konseling, memperoleh pelayanan hukum dan memperoleh bantuan hukum.

Kedua, perlindungan yang diberikan kepada Pekerja Rumah Tangga yang terkena kasus adalah sebagai berikut: (1) Putusan Nomor: 132/Pid.Sus//2010/PN.Ska, hakim memberikan perlindungan kepada korban Sri Wahyuni yang bekerja sebagai PRT berupa: (a) *Visum et Repertum* No. SFK005/VER/VI/2010 Urdokkes tanggal 26 Juni 2010 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. D. Aji Kadarmo, SpF, DFM dari Urusan Kedokteran dan Kesehatan Polres Surakarta; (b) Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa Maria Endang Sri Murnianti selama 6 (enam) bulan; (c) Membebaskan biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (Tiga Ribu Rupiah) kepada terdakwa Maria Endang Sri Murnianti; (d) Memperoleh bantuan hukum yang diberikan kepada korban dalam menjalankan proses pemeriksaan maupun persidangan (2) Putusan Nomor: 844K/Pid.Sus/2015, hakim memberikan perlindungan kepada korban Hermin Rusdiwidiyati alias Cici yang bekerja sebagai PRT berupa: (a) Mendapatkan restitusi dan kompensasi berupa tanggung jawab pelaku terhadap akibat yang ditimbulkan oleh kesalahan berupa memberikan ganti kerugian kepada keluarga korban; (b) *Visum Et Repertum* Instalasi Departemen Kedokteran Forensik FK USU RSUD Daerah DR. Pirngadi Kota Medan /Nomor: 2241/XII/IKK/VER/2014 tanggal 06 Desember 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter pemeriksa dr. Surjit Singh, Sp.F, DFM; (c) Menjatuhkan pidana kurungan selama 5 (lima) tahun kepada terdakwa Muhammad Hanafi Bahari; (c) Membebaskan biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (Dua Ribu Lima Rupiah) kepada terdakwa Muhammad Hanafi Bahari; (d) Memperoleh bantuan hukum yang diberikan kepada korban dalam menjalankan proses pemeriksaan maupun persidangan

4.2 Saran

Pertama, pekerja rumah tangga tidak dapat dipandang sebelah mata karena status mereka. Dalam hal ini PRT yang bekerja mempunyai hak-hak yang harus dihargai dan dilindungi. PRT sama halnya dengan pekerja lainnya yang harus diberikan perlindungan hukum atas dirinya, agar terealisasikan hak-hak PRT sebagai mestinya.

Kedua, dalam segi penjelasan ini, bahwasanya penulis hanya memperjelas bahwa PRT pun harus diberikan perlindungan hukum sebagaimana yang sudah

diatur dalam undang-undang dan peraturan lainnya, agar tidak semakin banyak lagi PRT yang menjadi korban kekerasan.

Persantunan

Karya ilmiah ini saya persembahkan kepada kedua orang tua saya yang telah memberikan dukungan moril maupun materil tak tak terhingga, sehingga penulis dapat menyelesaikan jenjang perkuliahan, terima kasih juga kepada ibu pembimbing skripsi yang telah memberikan arahan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini serta tidak lupa ucapan terima kasih atas do'a, dorongan, semangat dan motivasi dari segala penjuru serta teman-teman seperjuangan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- Ali,Achmad. 2010.*Menguak Teori Hukum (Legal Theory) & Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Undang-Undang (Legisprudence) Volume I Pemahaman Awal*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Azmy,Ana Sabhana. 2012.*Negara dan Buruh Migran Perempuan: Menelaah Kebijakan Perlindungan Masa Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono 2004-2010*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Dirdjosisworo,Soedjono. 2008.*Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Hadjon,Philipus M. 1987. *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya:Bina Ilmu.
- Ishaq,H. 2017.*Metodologi Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, Bandung:Penerbit Alfabet.
- Marzuki,Peter Mahmud. 2008. *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Nasution,A.Z. 1995. *Tinjauan Sosial Ekonomi dan Hukum pada Perlindungan Konsumen Indonesia*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

Jurnal

Lihat Kuswardani, “*Bentuk-bentuk Kekerasan Domestik dan Permasalahannya (Studi Perbandingan Hukum Indonesia dan Malaysia)*”, *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Volume 47, No. 4, 2017, halaman 421-438

Website/Internet

Kompas.com, Kamis, 15 September 2016, *Hingga September 2016, Kekerasan Terhadap PRT Capai 217 Kasus*, dalam <http://nasional.kompas.com/read/2016/09/15/16403781/hingga.september.2016.kekerasan.terhadap.prt.capai.217.kasus>, diunduh 5 Desember 2017, pukul 20.33 WIB.

PeraturanPerundang-undangan

Undang-UndangDasarTahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).

Undang-Undang No.13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Peraturan Menteri Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PRT).